

Wali Kota Serahkan Bantuan Pengembangan Usaha Program RT Mandiri



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/374139/wali-kota-serahkan-bantuan-pengembangan-usaha-program-rt-mandiri>

Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Muhammad Aditya Mufti Ariffin menyerahkan dana bantuan pengembangan usaha mendukung program Rukun Tetangga (RT) Mandiri di kota setempat.

"Kami berharap, dana bantuan untuk program RT Mandiri yang diserahkan mampu mendorong pengembangan usaha yang dijalankan kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungannya," ujar wali kota di Banjarbaru, Selasa.

Pernyataan itu disampaikan wali kota usai penyerahan dana bantuan sosial program RT Mandiri kepada beberapa pokmas di Kecamatan Landasan Ulin yang ditetapkan sebagai penerima bantuan.

Diketahui, empat pokmas di wilayah Kecamatan Landasan Ulin menjadi penerima bantuan sosial program RT Mandiri dan dananya digunakan untuk pengembangan usaha yang dijalankan kelompok masyarakat.

"Dana bantuan sosial program RT Mandiri bukan untuk perseorangan tetapi untuk kelompok masyarakat sehingga diharapkan digunakan untuk pengembangan usaha yang dijalankan bersama," ucap Aditya.

Aditya menuturkan, setiap pokmas menerima bantuan sosial sebesar Rp75 juta yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan baik dari sektor UMKM, jasa maupun sektor ekonomi lainnya.

Ditekankan, program RT Mandiri yang digagasnya merupakan salah satu program unggulan Pemkot dan dana bantuan diserahkan kepada kelompok masyarakat digunakan untuk berbagai kegiatan.

"Kegiatannya beragam, mulai dari sektor UMKM, pertanian dan sektor lainnya yang melibatkan kelompok masyarakat sehingga keberhasilan bisa dinikmati bersama-sama untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.

Ditambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi seluruh pokmas yang melaksanakan program RT Mandiri dan diharapkan program berlanjut di masa akan datang sehingga makin banyak hasil dinikmati masyarakat.

"Pesan kami, berdayakan seluruh elemen masyarakat baik kalangan ibu-ibu, pemuda dan unsur lainnya sehingga semua dapat merasakan manfaat lini usaha yang dijalankan melalui program RT Mandiri," ujarnya.

Perwakilan LPM Kelurahan Syamsudin Noor, Mukhyar berterima kasih atas program RT Mandiri yang membawa manfaat bagi masyarakat dan diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/374139/wali-kota-serahkan-bantuan-pengembangan-usaha-program-rt-mandiri>, 6 Juni 2023.
2. <https://www.kanalkalimantan.com/serahkan-program-rt-mandiri-wali-kota-aditya-pantang-menyerah/>, 13 Juni 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika

tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.